



BPK RI Periksa Dana Infrastruktur Jalan di Kalbar

PONTIANAK-RK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sedang mendalami pengelolaan keuangan negara, digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan di Kalbar.

Anggota BPK RI Ali Masykur Musa didampingi Rektor Untan Thamrin Usman. ANDREAS

■ Halaman 6



.....dari halaman 1

BPK RI Periksa

Anggota BPK RI Ali Masykur Musa MSi MHum mengatakan, timnya sedang mengkaji beberapa masukan dan laporan dari masyarakat yang disampaikan ke BPK. "Tim kami sedang melakukan pemeriksaan infrastruktur yang ada di Kalbar. Jadi semua masukan yang ada kita tampung, baik itu infrastruktur jalan nasional, provinsi dan daerah yang mengalami kerusakan, itu akan kami periksa," ujar Ali Masykur saat menghadiri dialog terbuka bersama civitas akademika Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak di rektorat Untan, Kamis (20/3).

Ali Masykur menilai, selama ini pemerintah terkesan lalai dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan. Baik jalan nasional maupun provinsi. "Semua tidak bertanggung jawab, lempar tanggungjawab, baik kewenangan pusat maupun provinsi," katanya.

Jika ingin membangun daerah, maka penyimpanan harus dihentikan. "Begitu juga kalau kita mau membangun masyarakat, imbuahnya.

Ali Masykur mengaku, April mendatang dipastikan pemerintah akan untuk membangun infrastruktur jalan selesai. Karena bulan Mei harus dil-

aporkan kepada pemerintah dan DPR, serta ke aparat penegak hukum, kalau memang ada penyalahgunaan.

"Sumber dana yang sedang diperiksa saat ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk tahun anggaran 2013. Kita tunggu saja hasilnya, ini sedang kami lakukan pemeriksaan," ujarnya lagi.

Guru Besar Bidang Ekonomi Fakultas Ekonomi Untan, Prof Dr Eddy Suratman mengaku, rusaknya infrastruktur jalan di Kalbar mengakibatkan Kalbar menjadi salah satu provinsi yang mengalami inflasi tertinggi se-Indonesia. "Inflasi di Kalbar Februari 2014 itu 2,3 persen. Jadi angka inflasi tertinggi di Indonesia, karena distribusi barang sulit dan rakyat ekonomisnya terganggu, harga menjadi mahal," jelas Eddy Suratman.

Mestinya, kata Eddy Suratman, pembangunan infrastruktur jalan di Kalbar harus dikawal dengan baik oleh aparat berwenang. Dosen ekonomi itu menilai, kualitas jalan di Kalbar masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. "Kualitas jalan di Kalbar menjadi tidak bagus, karena salah perencanaan, itu tidak efisien," ujarnya.

Surplus Demokrasi Minus Moralitas

Ali Masykur mengungkap, buruknya moralitas pengelola keuangan negara bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. "Secara deklaratif, mengapa keuangan bangsa tidak bisa diselamatkan. Karena moralitas bangsa semakin menurun, maka korupsi semakin merajalela. Artinya Indonesia surplus demokrasi, tapi minus moralitas," ujar Ali Masykur.

Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan negara prinsipnya harus akuntabilitas, dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. "Karena itu BPK menemukan pengelolaan keuangan negara setiap tahunnya cenderung menurun, dengan dibuktikan untuk tahun anggaran 2012 itu sekitar Rp3,7 triliun. In Efisiensi, baik menyangkut pengadaan barang, belanja pegawai, Bansos kami lakukan pemeriksaan. Ke depan jangan diulang lagi," tegas Ali Masykur.

Menurutnya, cara untuk meminimalisir angka korupsi hanya dengan mengubah sistem. "Orang tidak ada moralitas, maka sistem harus diperketat. Karena korupsi disebabkan personil suka korupsi, jadi

memang karakter dan niatnya mau korupsi. Sistem kita sekarang itu cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terjadinya korupsi juga disebabkan ada kolaborasi (kerjasama). Kalau kita mau menghentikan, maka pola itu harus dikelola dengan baik," jelasnya.

Ali Masykur menambahkan, hasil pemeriksaan BPK dijadikan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan. "Sebanyak 317 kepala daerah berurusan dengan KPK dan 40 persen ditahan," ingatnya.

Selain itu, tindak pidana korupsi juga bukan hanya terjadi di sektor hulu. Akan tetapi di sektor hulu. Yang mesti diperhatikan juga dengan hasil alam yang los dari penerimaan negara. "Peraturan yang lemah membuat pejabat negara korupsi," tegasnya.

Meski APBN terus bertumbuh, namun menurut Ali Masykur sangat minimalis. Karena bukan untuk kepentingan rakyat, banyak digerogoti oleh koruptor. "Akhirnya tidak ada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Laporan : Andreas
Editor: Hamka Saptono